

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Kabupaten Gresik

2.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Gresik adalah salah satu dari sembilan kota dan 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang berjarak sekitar 18 kilometer barat laut ibu kota provinsi, Kota Surabaya. Wilayah Kabupaten Gresik memiliki luas 1.191,26 km² dan antara 112° dan 113° BT dan 7° dan 8° LS. Dengan pengecualian Kecamatan Panceng yang memiliki ketinggian rata-rata sekitar 25 meter di atas permukaan laut, geografinya terutama terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 2 hingga 12 meter. Mayoritas wilayah Gresik merupakan wilayah pesisir yang membentang sekitar 140 kilometer dari pantai utara Pulau Jawa. Suhu udara rata-rata di wilayah ini berkisar antara 27,8°C hingga 33,4°C, yang menggambarkan iklim. Pola aliran air di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh tiga sungai besar, yaitu Kali Brantas, Kali Lamong, dan Sungai Bengawan Solo, serta diperkuat oleh keberadaan sumber air lain seperti mata air, waduk, bendungan, dan sistem pompa air yang turut mengatur distribusi air di wilayah ini.

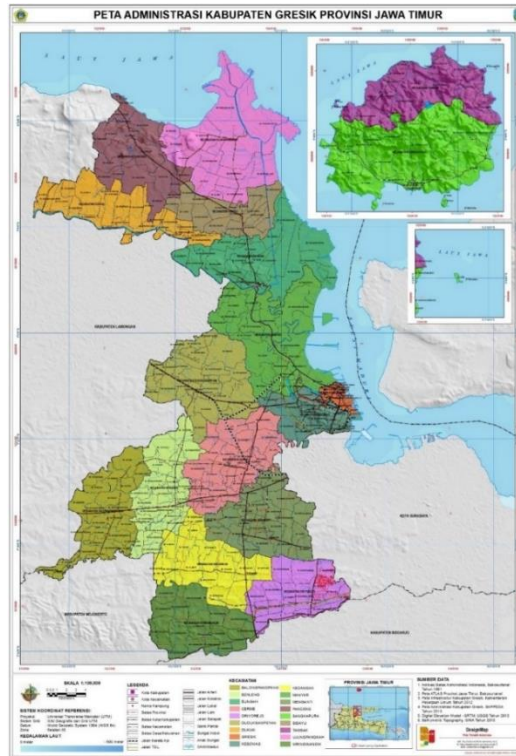
Secara administratif, Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, menandakan tidak adanya pemekaran wilayah baru. Dari keseluruhan wilayah, hampir sepertiga bagian merupakan kawasan pesisir, mencakup Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan

Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah. Kecamatan Sangkapura memiliki wilayah terluas dengan persentase sekitar 9,97% dari total luas kabupaten, sedangkan Kecamatan Gresik sebagai ibu kota kabupaten memiliki wilayah terkecil, yakni hanya 0,46%. Adapun Kecamatan Dukun memiliki jumlah desa atau kelurahan terbanyak, yaitu 26, sementara Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Tambak merupakan wilayah dengan jumlah desa paling sedikit, masing-masing sebanyak 13.

Secara administratif, Kabupaten Gresik memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara: berbatasan langsung dengan Laut Jawa,
- Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto,
- Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Lamongan,
- Sebelah timur: berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik



Sumber: petatematikindo.wordpress.com (2015)

Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 kecamatan, yang terdiri atas 303 desa dan 26 kelurahan.

Tabel 2.1 Jumlah Desa Dan Kelurahan Di Setiap Kecamatan Kabupaten Gresik

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Tambak	13	—
2.	Sangkapura	17	—
3.	Ujungpangkah	13	—
4.	Panceng	14	—
5.	Dukun	26	—
6.	Sidayu	21	—
7.	Bungah	22	—
8.	Manyar	23	—
9.	Gresik	5	—
10.	Kebomas	10	23
11.	Duduksampeyan	25	—
12.	Cerme	25	—

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
13.	Balongpanggung	23	–
14.	Benjeng	22	–
15.	Menganti	22	–
16.	Kedamean	15	–
17.	Driyorejo	16	–
18.	Wringinanom	16	–
	Jumlah	303 Desa	26 Kelurahan

Sumber: BPS Kabupaten Gresik (2025)

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2024 sebanyak 1.327.497 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 667.540 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 659.957 jiwa. Dari total penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2024, kelompok umur yang berjumlah paling banyak adalah kelompok umur 40-44 tahun dengan jumlah sekitar 107 ribu jiwa. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Gresik masih didominasi oleh penduduk usia produktif.

Tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Gresik adalah Kecamatan Menganti, Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas. Total persentase penduduk di tiga wilayah ini sebesar 27,99 persen. Sisanya, 72,01 persen penduduk tinggal menyebar di 15 kecamatan lainnya. Adapun wilayah dengan persentase penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tambak, dengan jumlah penduduk hanya 2.34 persen dari total penduduk Kabupaten Gresik. Berdasarkan jenis kelamin, tercatat bahwa pada tahun 2024 angka rasio jenis kelamin Kabupaten Gresik sebesar 101.04. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Wringinanom	74.154,0	0,45	5,59	1.184	101,6
Driyorejo	108.924,0	-2,94	8,21	2.124	101,7
Kedamean	64.213,0	1,20	4,84	974	102,2
Menganti	133.875,0	-1,81	10,08	1.948	101,8
Cerme	83.903,0	0,82	6,32	1.170	101,6
Benjeng	66.608,0	1,46	5,02	1.087	100,7
Balongpanggung	56.862,0	1,45	4,28	890	98,7
Duduksampeyan	49.736,0	1,39	3,75	669	100,0
Kebomas	115.078,0	-0,75	8,67	3.828	100,3
Gresik	80.005,0	1,18	6,03	14.441	98,7
Manyar	122.645,0	0,69	9,24	1.285	102,0
Bungah	69.581,0	1,60	5,24	876	102,6
Sidayu	44.542,0	0,60	3,36	945	101,6
Dukun	66.086,0	1,31	4,98	1.118	101,7
Panceng	53.606,0	1,49	4,04	856	100,3
Ujungpangkah	52.359,0	1,69	3,94	552	101,6
Sangkapura	54.311,0	1,78	4,09	457	102,1
Tambak	31.009,0	1,10	2,34	394	99,6
Gresik	1.327.497,0	0,31	100,00	1.114	101,0

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka (2025)

Sebelum ekspansi industri berlangsung secara masif, sebagian masyarakat Gresik menggantungkan hidup pada sektor agraris, perikanan, serta aktivitas kerajinan dan perdagangan skala kecil, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan kesuburan tanah akibat kondisi geografis yang tandus dan gersang.

Masuknya industri berskala besar mendorong terjadinya pergeseran mata

pencapaian, terutama di kalangan masyarakat pesisir. Banyak nelayan beralih profesi menjadi buruh industri dengan pertimbangan stabilitas pendapatan, kepastian jam kerja, serta jaminan sosial yang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan pekerjaan sebagai nelayan (Maghfiroh, 2018). Profesi nelayan semakin dianggap tidak menjanjikan akibat berbagai tekanan ekologis, seperti praktik overfishing, pencemaran perairan, serta menyempitnya wilayah tangkap sebagai dampak reklamasi dan pembangunan kawasan industri.

Transformasi ekonomi tersebut turut memengaruhi tatanan sosial masyarakat pesisir Gresik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam struktur sosial komunal dengan solidaritas tinggi dan ritual tradisional, seperti sedekah laut, mulai mengalami pergeseran menuju pola kehidupan yang lebih individualistis seiring dengan tuntutan kerja industri yang menekankan disiplin waktu dan produktivitas (Ridlo, 2018). Dengan demikian, industrialisasi tidak hanya mengubah struktur ekonomi lokal, tetapi juga merekonstruksi identitas sosial masyarakat maritim.

Sejak dekade 1980-an hingga akhir 1990-an, masyarakat pesisir Gresik mulai merasakan penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran perairan laut dan sungai yang disebabkan oleh limbah industri. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kerugian ekonomi nelayan, bahkan tidak jarang nelayan kembali melaut tanpa memperoleh hasil tangkapan yang memadai. Data Dinas Perikanan Jawa Timur juga menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam jumlah dan jenis ikan di perairan Gresik dalam kurun waktu 1996–2000, yang mengindikasikan tekanan serius terhadap keberlanjutan ekosistem perairan setempat (Surabaya Post, 25 Mei 1999).

2.1.3 Kondisi Ekonomi

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi unggulan pada sektor industri, pariwisata, dan pertanian. Potensi tersebut didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Gresik yang berperan sebagai daerah penyangga utama bagi pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Timur. Selain itu, Kabupaten Gresik termasuk dalam kategori Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sehingga memiliki peluang yang besar untuk mengalami percepatan pembangunan. Kedudukan strategis tersebut secara langsung mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah dan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah tersebut selama periode tertentu. Dengan demikian, peningkatan volume dan nilai produksi barang dan jasa menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika perekonomian daerah. Berdasarkan indikator tersebut, kinerja perekonomian Kabupaten Gresik dapat dianalisis melalui PDRB menurut lapangan usaha.

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Gresik pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,79 persen dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ini terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Namun demikian, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi dengan laju pertumbuhan negatif sebesar 5,49 persen. Sektor yang mencatatkan pertumbuhan

tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu sebesar 8,88 persen. Selanjutnya, sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 8,71 persen, diikuti oleh sektor Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,91 persen. Beberapa sektor lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, antara lain Jasa Lainnya sebesar 7,39 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 6,95 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,83 persen, serta Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 6,32 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha, 2022-2024 (persen)

Lapangan Usaha	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	8,74	4,74	6,32
Perdagangan; Reparasi Mobil & Motor	7,31	5,76	4,58
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,17	3,2	1,63
Konstruksi	5,43	5,51	4,42
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	8,93	6,88	6,83
Informasi & Komunikasi	3,97	6,8	6,95
Pertambangan & Penggalian	7,81	-0,98	-5,49
Transportasi & Pergudangan	13,96	11,98	8,71
Jasa Lainnya	19	4,78	7,39
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,36	1,09	8,88
Jasa Perusahaan	5,05	7,63	7,91
Lainnya	2,94	4,46	4,92

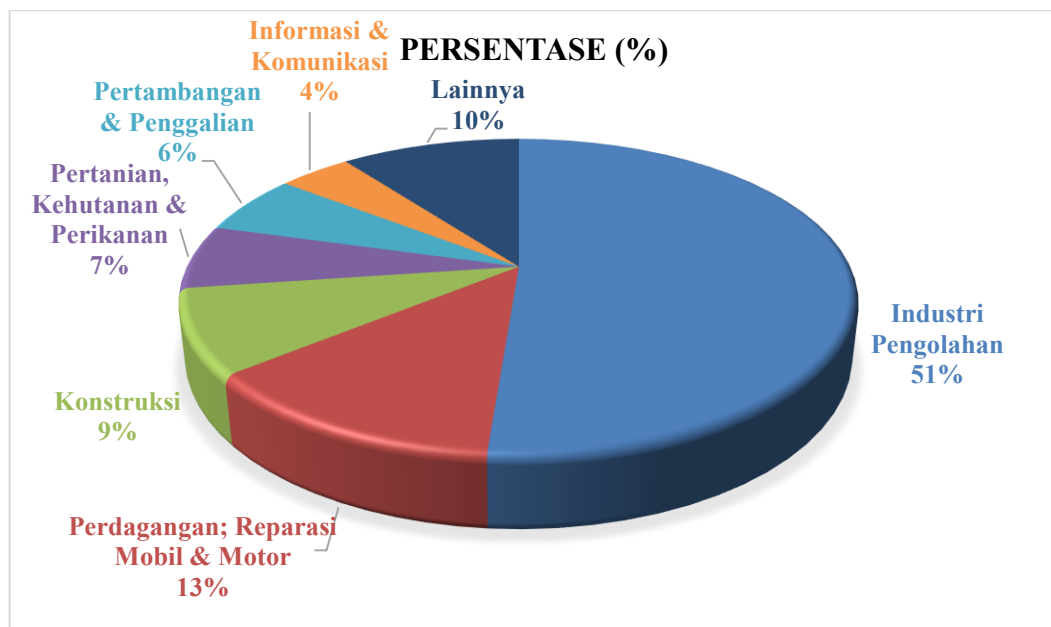
Sumber: BPS Kabupaten Gresik (2025)

2. Struktur PDRB menurut Lapangan

Struktur PDRB Kabupaten Gresik menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 51,25 persen

terhadap total PDRB. Sektor ini diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi sebesar 12,89 persen. Selanjutnya, sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 8,67 persen, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,55 persen, serta sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,14 persen. Dominasi sektor industri pengolahan tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Gresik masih bertumpu pada kegiatan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Gambar 2.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Gresik (2025)

2.2 Sejarah Industrialisasi di Kabupaten Gresik

2.2.1 Gresik Era Kerajaan Nusantara (Pra-Kolonial)

Sejak periode awal perkembangannya, Gresik telah tumbuh sebagai kawasan pesisir yang membentuk orientasi ekonomi masyarakatnya. Kondisi geografis

tersebut menjadikan aktivitas ekonomi darat dan maritim berkembang secara berdampingan, mencakup pertanian, perikanan, penambakan, serta perdagangan laut. Pola ekonomi pesisir ini telah terbentuk sejak masa Majapahit, sebagaimana tercatat dalam Prasasti Karang Bogem bertarikh 1387 M, yang menunjukkan adanya pengelompokan sosial masyarakat berdasarkan fungsi ekonomi, mulai dari nelayan, petani tambak, kelompok industri, hingga pedagang. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Gresik pada masa pra-kolonial telah memiliki struktur sosial-ekonomi yang terorganisasi dan terintegrasi dengan sistem kekuasaan kerajaan (Yamin, 1962).

Peran sektor perikanan dan penambakan menempati posisi penting dalam sistem ekonomi lokal, yang dikelola di bawah otoritas pejabat *pate tambak* sebagai perpanjangan tangan kekuasaan Majapahit. Selain aktivitas produksi, Gresik juga berkembang sebagai pusat pendidikan dan keagamaan seiring kedatangan tokoh-tokoh Muslim seperti Maulana Ibrahim dan Maulana Mahpur pada akhir abad ke-14. Proses islamisasi berjalan beriringan dengan aktivitas perdagangan dan berlangsung melalui pendidikan berbasis komunitas, yang berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai sosial, etika, dan spiritualitas masyarakat pesisir (Kasdi, 1995).

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas maritim, Gresik berkembang sebagai pusat industri dan perdagangan regional. Sejak abad ke-14 hingga ke-18 M, industri pengolahan hasil laut serta galangan kapal tumbuh pesat untuk mendukung pelayaran jarak jauh hingga kawasan timur Nusantara. Posisi Gresik sebagai bandar dagang multietnis semakin menguat dengan kehadiran komunitas pedagang dari India, Tiongkok, Arab, dan Asia Tenggara, yang membentuk pola permukiman

khas sesuai dengan fungsi ekonomi dan identitas sosial masing-masing kelompok.

Keunggulan geografis Gresik sebagai pelabuhan utama di pesisir utara Jawa diperkuat oleh keberadaan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas yang berfungsi sebagai jalur distribusi komoditas dari wilayah pedalaman. Menjelang akhir kekuasaan Majapahit, intensifikasi perdagangan rempah-rempah global semakin menempatkan Gresik sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan Malaka–Maluku. Peran syahbandar dan saudagar Muslim dengan jaringan perdagangan luas turut menciptakan iklim perdagangan yang aman dan inklusif, sehingga memperkuat posisi Gresik sebagai bandar internasional utama pada masa pra-kolonial (De Graaf & Pigeaud, 1985).

2.2.2 Masa Kolonial

Pada abad ke-16, wilayah Pesisir Utara Jawa merupakan ruang geoekonomi dan geopolitik yang dinamis, ditandai oleh keberadaan negeri-negeri pesisir otonom dengan orientasi ekonomi maritim. Pada paruh awal abad tersebut, Demak tampil sebagai kekuatan dominan dalam jaringan perdagangan dan politik pesisir. Namun, sejak paruh kedua abad ke-16, posisi tersebut secara bertahap digantikan oleh Surabaya yang berkembang menjadi pusat perdagangan antarpulau dan kekuatan maritim regional. Dalam konfigurasi ini, Gresik menempati posisi strategis sebagai salah satu pelabuhan utama yang terintegrasi dalam jaringan perdagangan Asia, khususnya jalur Malaka–Maluku, yang berperan penting dalam distribusi rempah-rempah ke wilayah barat Nusantara dan pasar internasional (Taselaar, 1998).

Meskipun Portugis sejak awal abad ke-16 berupaya menguasai perdagangan

rempah-rempah Asia, dominasi mereka di pesisir utara Jawa relatif terbatas. Melemahnya kontrol Portugis sejak dekade 1590-an, akibat persaingan dengan pedagang lokal dan resistensi politik, membuat pelabuhan-pelabuhan seperti Gresik tetap berfungsi sebagai bandar transit regional yang relatif otonom. Situasi ini mulai berubah pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17 ketika ekspansi Kerajaan Mataram dari pedalaman Jawa berhasil menaklukkan pusat-pusat kekuasaan pesisir, termasuk Surabaya pada tahun 1625. Penaklukan ini berdampak langsung pada perubahan pola perdagangan dan tata kelola pelabuhan, sekaligus menempatkan Gresik dalam orbit kekuasaan Mataram (Ricklefs, 2001).

Pada periode yang hampir bersamaan, aktivitas Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Jawa mulai meningkat. Hubungan awal VOC dengan Gresik berlangsung relatif terbuka, ditandai dengan pendirian pos dagang. Namun, setelah Gresik jatuh ke tangan Mataram pada 1613, VOC menarik diri dan memusatkan aktivitasnya di pelabuhan lain yang dianggap lebih strategis. Dalam perspektif VOC, Gresik dipandang sebagai bandar berskala menengah dengan pengaruh terbatas terhadap kepentingan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kendati demikian, struktur pelabuhan Jawa menunjukkan bahwa Gresik tetap memainkan peran penting dalam perdagangan regional, terutama melalui peran syahbandar sebagai otoritas utama pengelola pelabuhan, yang sering kali dipegang oleh kelompok Tionghoa dan terhubung erat dengan kekuasaan Surabaya (Taselaar, 1998).

Memasuki abad ke-17 hingga awal abad ke-18, Gresik masih berfungsi sebagai simpul perdagangan regional yang menghubungkan wilayah pesisir dengan

pedalaman Jawa. Perdagangan bahan pangan dan komoditas agraris dari pedalaman berlangsung melalui jaringan sungai, khususnya Bengawan Solo dan Brantas, menuju pelabuhan-pelabuhan pesisir. Sebaliknya, komoditas pesisir seperti garam dan ikan didistribusikan ke wilayah pedalaman. Aktivitas ekonomi ini tidak hanya melibatkan perdagangan skala besar, tetapi juga ditopang oleh jaringan pasar lokal dan peran signifikan perempuan dalam ekonomi rakyat (Sari dkk., 2025).

Namun, sejak awal abad ke-17, posisi Gresik sebagai bandar dagang internasional mulai mengalami kemunduran. Monopoli VOC atas perdagangan rempah-rempah, tekanan politik Mataram, serta pergeseran jalur perdagangan ke entropot baru seperti Batavia menyebabkan berkurangnya intensitas perdagangan di Gresik. Kebijakan kolonial berupa blokade dan pengendalian ketat terhadap pelayaran semakin mereduksi peran Gresik sebagai pelabuhan pengumpul. Pada periode kolonial selanjutnya, terutama sejak akhir abad ke-18, sentralisasi ekonomi Hindia Belanda yang memusatkan aktivitas pelabuhan di Surabaya melalui Pelabuhan Tanjung Perak semakin meminggirkan Gresik, yang bertransformasi menjadi pelabuhan tradisional dengan fungsi terbatas.

Secara historis, dinamika tersebut menunjukkan terjadinya transformasi struktural jangka panjang Gresik dari bandar maritim strategis dalam jaringan perdagangan internasional menjadi wilayah yang terintegrasi dalam sistem ekonomi kolonial yang berorientasi pada industri dan eksploitasi sumber daya. Meskipun perannya dalam perdagangan global mengalami pelemahan, Gresik tetap memiliki signifikansi sebagai simpul distribusi regional dan wilayah penyangga ekonomi, yang membentuk fondasi historis bagi perkembangan industri pada fase-fase

berikutnya.

2.2.2 Era Orde Baru

Pada tahap awal pembangunan ekonomi nasional pasca kemerdekaan, struktur perekonomian Indonesia masih bertumpu pada sektor primer, khususnya pertanian dan perkebunan, sementara sektor manufaktur belum berkembang secara signifikan dan belum berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Perhatian terhadap industrialisasi mulai menguat pada dekade 1960-an ketika pemerintah mengintegrasikan strategi industrialisasi ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Pendekatan yang diterapkan pada periode ini berorientasi pada *import-substitution industrialization* (ISI), yang diarahkan untuk menekan ketergantungan terhadap impor melalui peningkatan kapasitas produksi domestik serta perlindungan terhadap industri nasional yang masih berada pada tahap awal perkembangan (Mauliza dkk., 2023). Kebijakan tersebut menandai pergeseran awal orientasi pembangunan dari ekonomi yang dominan agraris menuju struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi.

Penguatan kebijakan industrialisasi berlangsung lebih sistematis pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I periode 1969–1974, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan sektor pertanian sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya stabilitas politik dan laju pertumbuhan ekonomi nasional, orientasi pembangunan kemudian bergeser secara bertahap. Industrialisasi diposisikan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dengan tujuan meningkatkan

pendapatan per kapita, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi melalui diversifikasi sektor produksi dan pengembangan industri berskala besar. Pergeseran orientasi ini membuka peluang bagi wilayah-wilayah tertentu untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan industri.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan industri di Provinsi Jawa Timur. Penetapan ini didukung oleh sejumlah keunggulan struktural, antara lain kedekatan geografis dengan Kota Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai simpul utama perdagangan dan logistik nasional, ketersediaan lahan yang relatif luas, serta keterintegrasian wilayah Gresik dalam jaringan distribusi regional dan nasional (Naimah & Utami, 2025) Selain itu, kondisi geografis Gresik yang didominasi oleh kawasan pegunungan kapur serta kedekatannya dengan wilayah pesisir menjadikan kawasan ini kurang ideal bagi pertanian intensif, tetapi memiliki potensi tinggi untuk pengembangan industri berskala besar dan padat modal (Fadlilah, 2020).

Awal proses industrialisasi di Kabupaten Gresik dapat ditelusuri sejak pendirian Pabrik Semen Gresik pada tahun 1953, yang menandai transformasi awal struktur ekonomi wilayah dari basis agraris-maritim menuju kawasan industri. Proses ini semakin diperkuat dengan berdirinya PT Petrokimia Gresik pada dekade berikutnya, yang mengukuhkan Gresik sebagai salah satu pusat industri strategis di Jawa Timur. Keberadaan industri-industri besar tersebut tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pendukung, mempercepat urbanisasi, serta memicu perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat lokal (Naimah & Utami, 2025). Perkembangan fungsi industri

ini selanjutnya diperluas melalui pembangunan fasilitas pelabuhan industri, seperti Pelabuhan Kalimireng, yang melayani kebutuhan logistik berbagai perusahaan besar.

Dinamika industrialisasi tersebut mencapai fase kritis pada pertengahan hingga akhir 1990-an. Pada periode 1996–1997, jumlah unit industri di Kabupaten Gresik tercatat mencapai sekitar 11.000 unit. Namun, krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan kontraksi signifikan pada aktivitas industri akibat melemahnya daya beli masyarakat dan terganggunya stabilitas ekonomi nasional. Meskipun demikian, sektor industri Gresik menunjukkan kemampuan pemulihan pascakrisis, dengan pertumbuhan sekitar 10,87 persen pada periode 1998–2000, yang mencerminkan peran strategis industri sebagai tulang punggung perekonomian daerah (Naimah & Utami, 2025)

Krisis ekonomi 1998 juga berimplikasi pada percepatan peralihan mata pencaharian masyarakat pesisir, terutama dari nelayan tradisional menuju buruh industri. Tekanan ekonomi berupa meningkatnya biaya operasional melaut, menurunnya daya beli masyarakat, serta melemahnya produktivitas perikanan mendorong nelayan mencari sumber penghidupan alternatif yang dinilai lebih stabil (Naimah & Utami, 2025). Sektor industri kemudian dipersepsikan menawarkan pendapatan yang relatif tetap, jaminan sosial, dan peluang mobilitas sosial yang lebih baik dibandingkan sektor perikanan tradisional.

Peralihan profesi tersebut tidak hanya dipicu oleh pertimbangan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai dan aspirasi sosial masyarakat pesisir. Profesi nelayan yang sebelumnya memiliki nilai simbolik

sebagai representasi kemandirian dan identitas lokal mulai kehilangan daya tarik, sementara pekerjaan di sektor industri semakin diasosiasikan dengan stabilitas ekonomi, status sosial yang lebih tinggi, dan prospek kehidupan yang lebih menjanjikan (Abdullah, 2019). Generasi muda nelayan, khususnya, cenderung memandang pekerjaan pabrik sebagai jalan keluar dari ketidakpastian yang melekat pada sektor perikanan, meskipun pekerjaan tersebut berada dalam struktur korporasi yang hierarkis dan bergantung pada satu entitas industri.

Selain faktor ekonomi dan sosial, tekanan ekologis turut mempercepat pergeseran mata pencaharian tersebut. Pencemaran perairan akibat limbah industri, praktik penangkapan ikan berlebih, serta meningkatnya biaya operasional seperti bahan bakar dan peralatan tangkap berkontribusi terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan secara berkelanjutan. Kondisi ini semakin melemahkan daya saing sektor perikanan sebagai sumber penghidupan utama masyarakat pesisir.

Transformasi struktural ini tercermin dalam perubahan komposisi tenaga kerja di Kabupaten Gresik pada periode 1996–2000. Jumlah tenaga kerja secara keseluruhan meningkat dari 155.550 orang pada tahun 1996 menjadi 189.324 orang pada tahun 2000, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi. Sebaliknya, jumlah nelayan cenderung stagnan dan mengalami penurunan gradual, dari 7.999 orang pada tahun 1996 menjadi 7.815 orang pada tahun 2000. Tren ini menunjukkan pergeseran bertahap mata pencaharian masyarakat pesisir dari sektor maritim tradisional menuju sektor industri, sekaligus menegaskan meningkatnya ketergantungan ekonomi lokal terhadap industri sebagai penyedia lapangan kerja utama (Naimah & Utami, 2025).

Pergeseran tersebut turut membentuk orientasi sosial dan aspirasi kelas baru di kalangan masyarakat pesisir. Pendidikan formal mulai dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan peluang generasi muda mengakses pekerjaan di sektor industri maupun birokrasi. Fenomena ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai sosial baru yang menekankan mobilitas sosial dan kemajuan ekonomi, yang secara bertahap menggantikan orientasi tradisional masyarakat pesisir yang sebelumnya berakar pada keberlanjutan ekologis dan keterikatan yang kuat dengan alam.

2.3 Profil Kecamatan Manyar

2.3.1 Letak Geografis

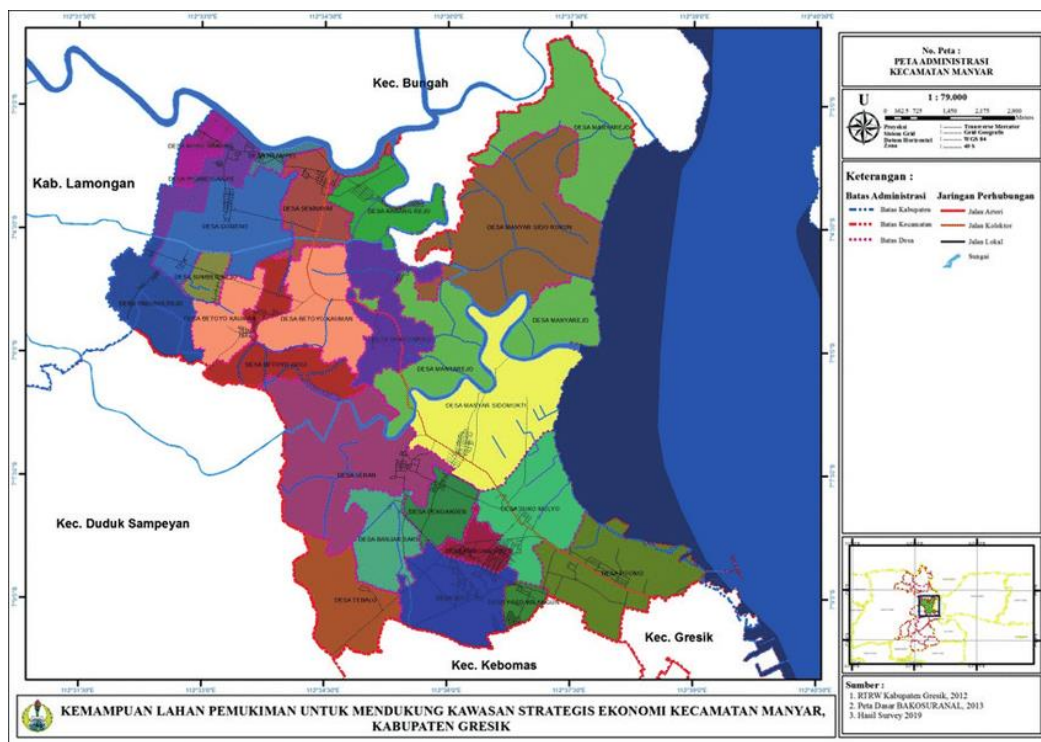
Kecamatan Manyar merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kecamatan Manyar berbatasan dengan Kecamatan Bungah di sebelah utara, Selat Madura dan Kecamatan Gresik di sebelah timur, Kecamatan Kebomas di sebelah selatan, serta Kecamatan Duduksampeyan di sebelah barat. Kecamatan ini berada pada ketinggian rata-rata ± 3 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki karakteristik wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan lingkungan sekaligus strategis bagi aktivitas pelabuhan dan industri maritim.

2.3.2 Luas Wilayah

Berdasarkan data Kecamatan Manyar Dalam Angka 2025, luas wilayah Kecamatan Manyar mencapai 79,94 km², yang terbagi ke dalam 23 desa. Desa Leran merupakan desa dengan wilayah terluas, yaitu sekitar 13,47 km² atau sekitar 16,86 persen dari total luas kecamatan, sedangkan Desa Gumeno menjadi desa

dengan wilayah terkecil, yaitu sekitar 0,06 km² atau kurang dari 0,1 persen dari luas wilayah Kecamatan Manyar. Distribusi luas wilayah yang tidak merata ini memengaruhi pola pemanfaatan ruang, kepadatan penduduk, serta arah pembangunan antar desa di Kecamatan Manyar.

Gambar 2.3 Peta Administrasi Kecamatan Manyar



Sumber: Rencana Tata Ruang Kabupaten Gresik 2012 (BAPPEDA, 2011)

2.3.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Manyar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 122.645 jiwa, yang terdiri atas 61.933 jiwa penduduk laki-laki dan 60.712 jiwa penduduk perempuan. Komposisi penduduk menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun), dengan kelompok umur 40–59 tahun sebagai kelompok terbesar yang mencapai 33.421 jiwa.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Hasil Registrasi Menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Manyar Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tebalo	1.566	1.512	3.078
2	Suci	10.018	10.009	20.027
3	Yosowilangun	6.295	6.372	12.667
4	Roomo	2.757	2.683	5.440
5	Sukomulyo	5.272	5.256	10.528
6	Pongangan	5.240	5.195	10.435
7	Peganden	3.844	3.778	7.622
8	Banjarsari	2.482	2.385	4.867
9	Leran	3.027	2.903	5.930
10	Manyarejo	2.396	2.237	4.633
11	Manyarsidorukti	1.485	1.377	2.862
12	Manyarsidorukun	2.101	1.971	4.072
13	Banyuwangi	1.225	1.125	2.350
14	Karangrejo	2.723	2.485	5.208
15	Sembayat	3.482	3.420	6.902
16	Betoyoguci	998	1.075	2.073
17	Betoyokauman	1.356	1.240	2.596
18	Sumberrejo	393	360	753
19	Tanggarejo	1.354	1.379	2.733
20	Gumeno	1.865	1.927	3.792
21	Ngampel	713	709	1.422
22	Pejanggaran	603	571	1.174
23	Morobakung	738	743	1.481
	Kecamatan Manyar	61.933	60.712	122.645

Sumber: Kecamatan Manyar Dalam Angka (2025)

Struktur demografis ini mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia yang relatif kuat untuk mendukung aktivitas ekonomi, khususnya di sektor industri dan jasa yang berkembang pesat di wilayah ini. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Manyar juga menunjukkan tren meningkat, yang dipengaruhi oleh arus urbanisasi dan migrasi tenaga kerja seiring berkembangnya kawasan industri dan proyek strategis nasional di wilayah tersebut.

2.3.4 Potensi Ekonomi

Secara historis, Kecamatan Manyar didominasi oleh kegiatan ekonomi

berbasis pertanian, perikanan, tambak garam, dan tambak ikan. Namun, dalam satu dekade terakhir terjadi transformasi struktur ekonomi yang signifikan. Kedekatan wilayah Manyar dengan jaringan jalan tol, pelabuhan, serta kawasan industri menjadikannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Gresik.

Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) mendorong pergeseran mata pencaharian penduduk dari sektor primer menuju sektor industri manufaktur, logistik, dan jasa pendukung industri. Selain itu, sektor perdagangan, transportasi, pergudangan, serta usaha mikro dan kecil juga mengalami perkembangan sebagai efek turunan dari industrialisasi. Potensi ekonomi Kecamatan Manyar diperkuat oleh ketersediaan tenaga kerja usia produktif dan posisi strategisnya dalam kawasan metropolitan Gerbangkertosusila.

2.3.5 Pemerintahan

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 menempatkan Kecamatan Manyar sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dalam struktur tata ruang dan pembangunan daerah. Sebagian wilayah Kecamatan Manyar ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) bersama Kecamatan Gresik, Kebomas, Menganti, dan Driyorejo. Kawasan PKN ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa, serta industri pengolahan yang menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi regional.

Selain itu, sebagian wilayah Kecamatan Manyar juga ditetapkan sebagai

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama Kecamatan Wringinanom, yang diarahkan untuk pengembangan industri dan pelabuhan berskala internasional. Penetapan sebagai PKN dan PKW ini mempertegas peran Kecamatan Manyar sebagai salah satu motor penggerak pembangunan industri di Kabupaten Gresik sekaligus bagian penting dari kawasan metropolitan Gerbangkertosusila.

Kecamatan Manyar menjadi salah satu dari dua kecamatan di Kabupaten Gresik yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Dari total 23 desa yang berada di Kecamatan Manyar, terdapat lima desa yang masuk ke dalam zona ring 1 KEK Gresik. Zona ring 1 merupakan zona prioritas yang mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam aspek penyerapan tenaga kerja lokal dan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pihak pengembang kawasan industri.

Zona ring 1 ditetapkan bagi desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan KEK Gresik, sehingga masyarakatnya terdampak secara langsung oleh aktivitas pembangunan dan operasional industri. Penetapan ini menempatkan Kecamatan Manyar pada posisi yang sangat strategis, namun sekaligus rentan, karena manfaat ekonomi dan dampak sosial-lingkungan pembangunan industri harus dikelola secara seimbang agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan stabilitas sosial.

Adapun lima desa di Kecamatan Manyar yang termasuk dalam zona ring 1 KEK Gresik, yaitu:

1. Desa Manyarejo
2. Desa Manyar Sidomukti

3. Desa Manyar Sidorukun
4. Desa Banyuwangi
5. Desa Karangrejo

Keberadaan desa-desa dalam zona ring 1 menjadikan wilayah ini sebagai fokus utama dalam kajian dampak sosial, ekonomi, dan tata kelola pembangunan kawasan industri, khususnya dalam konteks hubungan antara pemerintah daerah, pengembang KEK, dan masyarakat lokal.

2.4 Pembangunan KEK Gresik (JIPE) di Kecamatan Manyar

Pada fase perkembangan mutakhir, industrialisasi di Kabupaten Gresik menunjukkan intensifikasi yang semakin nyata seiring dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE). Kehadiran kawasan ini menandai babak baru dalam dinamika industrialisasi Gresik, yang tidak lagi bertumpu semata pada industri-industri besar konvensional, tetapi berkembang menuju model kawasan industri terpadu yang mengintegrasikan fungsi produksi, logistik, pelabuhan, dan permukiman dalam satu sistem terencana. Penguatan fungsi JIPE sebagai pusat industri dan logistik regional didukung oleh pembangunan infrastruktur strategis, khususnya Jalan Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM), yang menghubungkan kawasan industri di Gresik dengan jaringan transportasi regional dan nasional. Kedekatan jarak antara pintu keluar Tol Manyar dengan kawasan JIPE, yang hanya sekitar 3,5 kilometer, semakin meningkatkan efisiensi mobilitas barang dan tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya tarik kawasan ini bagi investor industri berskala besar dan berorientasi ekspor.

Pengembangan kawasan industri di Gresik, termasuk JIPE, tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan tata ruang dan pembangunan wilayah yang lebih luas. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011–2031, kawasan Gresik termasuk dalam sistem perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan), yang diklasifikasikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 24, PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan berskala internasional, nasional, maupun lintas provinsi.

Dengan demikian, posisi Kabupaten Gresik dalam struktur ruang regional menempatkannya sebagai bagian integral dari Surabaya Metropolitan Area, yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus peran strategis dalam mendukung aktivitas industri, perdagangan, dan logistik pada skala nasional hingga global.

Secara kronologis, pengembangan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE) telah dimulai sejak tahun 2013 sebagai kawasan industri terpadu yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan industri manufaktur modern dan logistik pelabuhan. Tahap awal pengembangan ini mencerminkan upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk merespons meningkatnya kebutuhan akan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam, guna meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menurunkan biaya logistik. Upaya tersebut memperoleh legitimasi kelembagaan yang lebih kuat ketika JIPE secara resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah

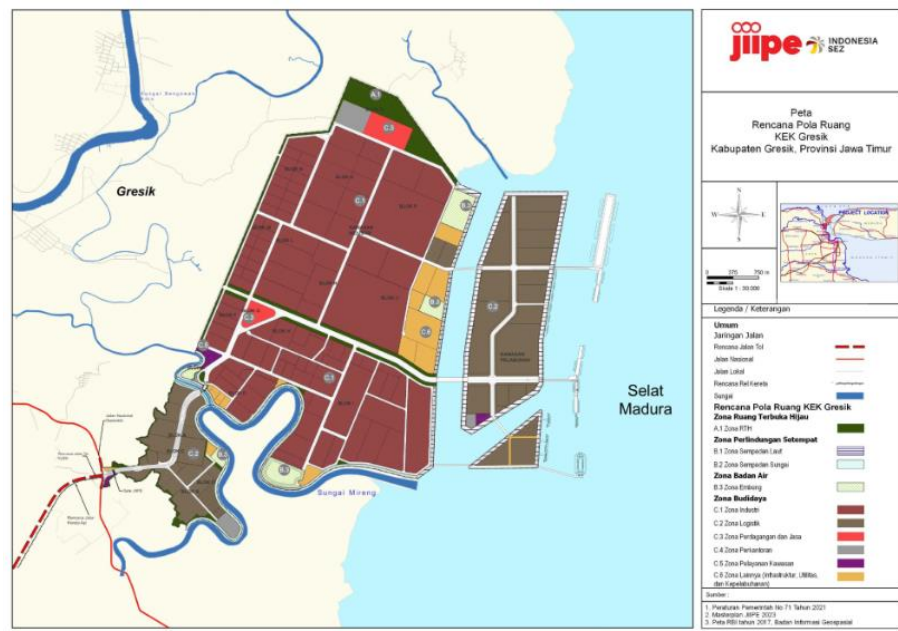
Nomor 71 Tahun 2021 pada tanggal 28 Juni 2021. Penetapan ini menjadikan JIPE sebagai KEK terintegrasi industri dan pelabuhan pertama di Indonesia, sekaligus mempertegas perannya sebagai proyek strategis nasional dalam kerangka percepatan pembangunan ekonomi.

Dari sisi skala dan peruntukan ruang, KEK JIPE memiliki luas sekitar 3.000 hektare yang terbagi ke dalam beberapa zona utama, yaitu zona industri seluas kurang lebih 1.761 hektare, zona pelabuhan laut seluas sekitar 400 hektare, serta kawasan hunian seluas kurang lebih 800 hektare yang dikembangkan dengan konsep kota mandiri. Konsep ini mencerminkan pendekatan pembangunan kawasan industri modern yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan melalui penyediaan fasilitas permukiman, layanan publik, dan infrastruktur pendukung lainnya. KEK JIPE dikembangkan melalui kerja sama antara PT AKR Corporindo dan PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) beserta anak perusahaan masing-masing, dengan target jangka panjang untuk menarik investasi hingga Rp237,86 triliun dan menciptakan hampir 200.000 lapangan kerja pada tahun 2030. Hingga Triwulan III tahun 2023, realisasi investasi di kawasan ini telah mencapai sekitar Rp52 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 24.000 orang, yang menunjukkan kontribusi signifikan KEK JIPE terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional (kek.go.id, 2022).

Pembentukan KEK Gresik dilatarbelakangi oleh kebutuhan struktural untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja, mendorong transformasi ekonomi, serta meningkatkan daya saing industri nasional. Tingginya biaya logistik Indonesia,

yang pada kuartal I tahun 2021 mencapai sekitar 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (INDEF, 2023), serta posisi Indonesia yang relatif tertinggal dalam peringkat Logistics Performance Index (LPI) dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, menjadi faktor pendorong utama pengembangan kawasan industri terpadu seperti JIPE. Integrasi antara kawasan industri dan pelabuhan dalam satu wilayah terencana dipandang sebagai strategi efektif untuk menekan biaya logistik, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan global.

Gambar 2.4 Peta Kawasan Ekonomi Khusus Gresik (JIPE)



Pemilihan Kabupaten Gresik sebagai lokasi KEK JIPE didasarkan pada posisinya yang strategis sebagai wilayah hinterland Surabaya Metropolitan Area sekaligus sebagai pusat industri manufaktur di Jawa Timur. Gresik memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam berbagai sektor, antara lain industri pengolahan, logistik dan distribusi, riset dan pengembangan, teknologi industri,

ekonomi digital, serta energi. Keunggulan tersebut diperkuat oleh kesiapan infrastruktur wilayah, termasuk keberadaan pelabuhan, akses langsung ke jalan tol Surabaya–Jakarta, jalur nasional Pantai Utara Jawa, serta jaringan kereta api Surabaya–Jakarta. Infrastruktur ini memungkinkan pengembangan industri berorientasi ekspor dan substitusi impor yang lebih efisien dan terintegrasi. Fokus pengembangan sektor industri di KEK JIPE diarahkan pada industri berteknologi tinggi, industri logam, elektronik, kimia, energi, serta logistik, yang dirancang untuk membentuk ekosistem industri terpadu berbasis aglomerasi, efisiensi produksi, dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Dari aspek hukum dan kelembagaan, pembentukan KEK Gresik melalui JIPE memiliki landasan regulasi yang kuat. Usulan pembentukan kawasan ini diajukan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dan telah memenuhi seluruh persyaratan substantif maupun administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Usulan tersebut memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur Jawa Timur dan Bupati Gresik, kemudian dikaji secara komprehensif oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebelum direkomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia. Penetapan KEK Gresik melalui Peraturan Pemerintah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan kawasan, tetapi juga menjamin iklim investasi yang kondusif melalui penyediaan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan perizinan, serta tata

kelola kawasan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.

Perkembangan KEK JIPE merepresentasikan fase lanjut dari industrialisasi di Kabupaten Gresik, yang ditandai oleh pergeseran dari pola industrialisasi sektoral menuju pengembangan kawasan industri terpadu berbasis logistik dan pelabuhan. Transformasi ini memperkuat posisi Gresik dalam struktur ekonomi regional dan nasional, sekaligus menegaskan perannya sebagai simpul penting dalam jaringan industri dan perdagangan Indonesia. Namun, dinamika tersebut juga mengandung implikasi kompleks terhadap tata ruang, lingkungan, dan struktur sosial ekonomi lokal, yang menuntut pengelolaan pembangunan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan agar pertumbuhan industri dapat berjalan seiring dengan perlindungan sumber daya lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.